

informatif • edukatif • inovatif

# ekspresi

## Ujian Nasional, Mampukah Menjadi Penyintas Dunia Pendidikan di Indonesia?

ekspresi

Edisi 28 Tahun XV April 2017

ISSN 1693-3826



Diterbitkan oleh  
PPPPTK Bahasa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber Pengetahuan dan Penalaran Ilmiah

Hoax dan Literasi Kita

Pandangan Beberapa Semantisi tentang Sinonimi dalam Kajian Makna Bahasa

Mengapa Bahasa Prancis Penting Dipelajari?

Penyiapan Data dengan Program RUMM 2030 untuk Analisis pada Model Rasch

Workshop Pembuatan Video Animasi Pembelajaran Bahasa dengan Videoscribe

Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia dalam bertutur dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda. Tanda tersebut adalah kata dan gerakan. Jumlah bahasa di dunia diperkirakan mencapai 6000-an lebih. Bahasa juga identik dengan identitas sebuah bangsa. Karena itu, muncul pepatah berkaitan dengan ini, *bahasa menunjukkan bangsa*.

Redaksi Ekspresi menghadirkan sajian Laporan Utama *Bahasaku, Bahasamu ....* Dalam tulisan ini disebutkan bahwa bahasa merupakan medium yang digunakan untuk memahami dunia serta alat dalam proses berpikir sekaligus pemahaman terhadap bahasa merupakan hasil dari aktivitas pikiran. Sebagai media dalam berpikir, kata-kata sangat terkait erat dengan pikiran. Di dalam berpikir terjadi proses asosiasi antara konsep atau simbol satu dengan konsep lain yang diakhiri dengan penarikan simpulan.

Dalam edisi kali ini juga disajikan tulisan mengenai kebahasaan, antara lain *Antara Logika dan Bahasa: Mengenal Filsafat Bahasa dalam Kitab Fi Falsafah al Lughah, Konsep dan Jenis Frasa dalam Bahasa Arab, Pertarafan Adjektiva Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Tingkat Kualitas*, juga mengenai pembelajaran bahasa Indonesia *Pembelajaran BIPA di Pusat Budaya Indonesia, Dili-Timor Leste*.

Akhir kata, semoga sajian *Ekspresi* kali ini dapat memberikan energi intelektualitas dan kreativitas. Selamat membaca!

## Senarai Bahasa

### Laporan Utama

Ujian Nasional, Mampukah Menjadi Penyintas Dunia Pendidikan di Indonesia? [4]

### Bahasa dan Sastra

Pandangan Beberapa Semantisi tentang Sinonimi dalam Kajian Makna Bahasa [11]

Sumber Pengetahuan dan Penalaran Ilmiah [17]

Hoax dan Literasi Kita [24]

Penyiapan Data dengan Program RUMM 2030 untuk Analisis pada Model Rasch [29]

Mengapa Bahasa Prancis Penting Dipelajari? [40]

Workshop Pembuatan Video Animasi Pembelajaran Bahasa dengan Videoscribe [46]

### Lintas Bahasa dan Budaya

**daftarisi**

Pembina Kepala PPPPTK Bahasa Luizah F. Saidi Penanggung Jawab Kabag Umum Teguh Santoso Pemimpin Redaksi Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Joko Isnadi, Kaur Protokol dan Dokumentasi Iri Agus Sudirdjo Redaktur Pelaksana Yusup Nurhidayat Redaktur Ririk Ratnasari, Gunawan Widiyanto, Joko Subroto Desain Sampul dan Tataletak Yusup Nurhidayat Pencetakan dan Distribusi Naidi, Djudju, Komariah Alamat Redaksi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Kotak Pos 7706 JKS LA Telp. (021) 7271034 Faks. (021) 7271032

Laman: [www.pppptkbahasa.net](http://www.pppptkbahasa.net) Surel: [majalah.ekspresi.p4tkbahasa@gmail.com](mailto:majalah.ekspresi.p4tkbahasa@gmail.com)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN**  
**TENAGA KEPENDIDIKAN BAHASA**

# Ujian Nasional, Mampukah Menjadi Penyintas Dunia Pendidikan di Indonesia?

## Sekelumit Ujian Nasional

Ujian memang menjadi sebuah keniscayaan dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui ketercapaian proses belajar. Di setiap akhir tahun pelajaran di Indonesia akan dilakukan sebuah hajat nasional pendidikan, yaitu Ujian Nasional. Ujian Nasional (UN) merupakan tes standar nasional untuk mencapai kelulusan secara nasional dan merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 yang menyatakan bahwa penilaian dilakukan oleh guru, satuan pendidikan sekolah. Regulasi itu kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

**laporan**utama

# LAPORAN UTAMA

Sebelum UN hadir, sistem penilaian pendidikan di Indonesia telah diwarnai dengan berbagai istilah untuk menyebut evaluasi akhir belajar secara nasional, salah satunya Ujian Negara. Istilah Ujian Negara ini digunakan pada periode sebelum tahun 1969, yang berlaku untuk semua mata pelajaran dan ujian pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada periode 1972-1982 sistem penilaian pendidikan diubah menjadi Ujian Sekolah. Dalam sistem ini setiap sekolah atau rayon menyusun dan menyelenggarakan ujian akhir masing-masing; pemerintah pusat hanya menyusun pedoman umum untuk mengendalikan mutu pendidikan serta mendapatkan makna yang “setara” sebagai hasil penilaian pendidikan.

Era selanjutnya, pada rentang 1982-2002 ujian akhir sekolah disebut Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Dalam EBTANAS ini, perangkat

soal dikembangkan secara “pararel” untuk mata pelajaran tertentu. Soal mata pelajaran EBTANAS disusun oleh pemerintah pusat sedangkan soal mata pelajaran semester II serta hasil Nilai EBTANAS Murni (NEM). Pada tahun 2002-2004, EBTANAS diganti dengan penilaian hasil

RIRIK RATNASARI

# LAPORAN UTAMA

belajar secara nasional dan diberi nama Ujian Akhir Nasional (UAN). Perbedaan mendasar antara UAN dan EBTANAS adalah dalam menentukan kelulusan siswa. Kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada tahun 2005, UAN berubah lagi menjadi UN, yang dikenal hingga sekarang. UN pada masa tersebut berlaku untuk jenjang SMP dan SMA sedangkan untuk SD pemerintah menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada tahun ajaran 2008/2009.

## SELURUH SISWA WAJIB MENGIKUTI UN UNTUK MENGUKUR PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN SISWA SECARA NASIONAL

Tahun 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sempat melontarkan gagasan moratorium UN. Kabar ini cukup menarik, mengingat UN sudah mengakar sebagai bagian evaluasi akhir siswa di setiap jenjang pendidikan; bahkan UN pernah menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Ada tiga alasan diusulkannya moratorium tersebut.

Pertama, hasil UN tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kurang mendorong kemampuan siswa secara utuh. Kedua, cakupan UN juga terlalu luas sehingga sulit diselenggarakan secara kredibel dan bebas kecurangan. Ketiga, UN cenderung membawa proses belajar pada orientasi yang salah karena sifat UN hanya menguji ranah kognitif, mata pelajaran tertentu. Sebagai proses evaluasi yang bersifat massal, sampai saat ini bentuk soal UN adalah pilihan ganda. UN telah menjauhkan diri dari pembelajaran yang mendorong

siswa berpikir kritis, analitis, dan praktik-praktik penulisan esai sebagai latihan mengespresikan pikiran dan gagasan anak didik.

Selama ini, UN sebagai subsistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolok ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, seluruh siswa wajib mengikuti UN untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan siswa secara nasional.

Selain itu, hasil UN digunakan sebagai pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, bagi daerah hasil UN dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemetaan pencapaian standar peserta di-

dik, satuan pendidikan maupun wilayah. Pemetaan ini dapat digunakan untuk menyusun program pembinaan untuk satuan pendidikan dan wilayah.

Meski UN disebut sebagai salah satu sistem penilaian dan pengukuran hasil belajar siswa, terdapat beberapa negara yang tidak menggunakan ujian secara nasional. seperti Finlandia, Amerika, Jerman, Kanada, dan Australia. Penilaian akhir pendidikan di Finlandia diserahkan kepada guru masing-masing. Pemerintah hanya memfasilitasi guru dengan pelatihan khusus evaluasi. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh guru juga tidak digunakan sistem pemeringkatan (ranking) seperti yang selama ini terjadi di Indonesia. Amerika adalah negara lain yang juga tidak melaksanakan ujian secara nasional. Ujian dilaksanakan oleh negara bagian atau sekolah masing-masing. Ujian secara nasional juga tidak dilaksanakan di Jerman. Untuk menilai hasil

belajar siswa, evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus, komprehensif, dan objektif baik sikap maupun perilaku oleh guru. Berbeda dengan Jerman, Kanada tidak menggelar UN dan untuk melaksanakan penilaian terdapat sebuah lembaga penjamin mutu pendidikan. Kelulusan ditentukan oleh nilai rapor. Negara maju lain yang tidak menggunakan ujian nasional adalah Australia. Di Negara ini, ujian tidak dilakukan secara nasional tetapi dilakukan ujian negara. Ujian tidak bertujuan menentukan kelulusan siswa, tetapi menentukan pilihan perguruan tinggi untuk melanjutkan studinya.

Pakar pendidikan dari Amerika Linda Hammond (1994) menjelaskan bahwa nasionalisasi

*NASIONALISASI UJIAN  
SEKOLAH MEMBUAT GURU  
TIDAK KREATIF KARENA  
SEKOLAH TIDAK BISA  
MENCIPTAKAN SENDIRI  
STRATEGI BELAJAR SESUAI  
DENGAN PERBEDAAN  
KONDISI SOSIAL, EKONOMI,  
BUDAYA, DAN KEMAJUAN  
TEKNOLOGI*

ujian sekolah membuat guru tidak kreatif karena sekolah tidak bisa menciptakan sendiri strategi belajar sesuai dengan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan teknologi. Sistem pendidikan bergaya atas-bawah (top down) tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul.

Jadi, kualitas mereka benar-benar diuji ketika mereka hendak memasuki perguruan tinggi. Tidak ada nilai yang 'dikontrol' oleh sekolah atau guru mereka. Negara-negara yang tidak menyelenggarakan UN menggunakan sistem ujian masuk bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Ujian di negara ini hanya diadakan di tingkat negara bagian.

Meskipun demikian, sekolah tidak diwajibkan untuk mengikuti di ujian ini. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi, sekolah diberikan kebebasan penuh untuk menentukan materi ujian di

tempat mereka masing-masing.

Selain Indonesia, Inggris mengenal sistem ujian nasional. Hasil ujian itu tidak menyatakan kelulusan siswanya. Semuanya lulus, yang membedakan adalah tinggi rendahnya nilai yang diperoleh setiap siswa. Nilai inilah yang digunakan untuk masuk ke universitas-universitas di Inggris. Tiap universitas tentunya sudah memiliki standar sehingga siswa yang ingin masuk ke Universitas Cambridge, misalnya, harus belajar secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai bagus menurut standar kampus itu.

Hal inilah yang membedakannya dengan UN di Indonesia. Meskipun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 UN bahwa nilai UN tidak lagi menentukan kelulusan, ia tidak digunakan untuk nilai masuk perguruan tinggi. Untuk memasuki perguruan tinggi yang diinginkan, siswa harus mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.

## Ujian Nasional 2017

Berita yang dirilis dalam [kompas.com](http://kompas.com) pada 19 Desember 2016 menyebutkan bahwa usulan moratorium UN yang pernah diusulkan oleh menteri tidak disetujui oleh presiden melalui rapat di dewan perwakilan rakyat (DPR). Presiden memutuskan UN tetap dilaksanakan karena melihat hasil-hasil survei yang dilakukan PISA menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahun meningkat tajam. Untuk itu, pada 22 Desember 2016 telah diselenggarakan Rakor Ujian Nasional 2017, seperti rilis dalam laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id).

Dalam kesempatan itu, menteri menyampaikan bahwa UN tetap dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk beberapa mata pelajaran. Soal USBN akan dibuat oleh MGMP dan KKG sebagai organisasi profesi untuk menyiapkan para guru di MGMP dan KKG dalam pe-

nyusunan soal. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan pelatihan dan penulisan kisi-kisi ujian.

Mata pelajaran yang diujikan dalam UN tahun 2017 pada jenjang SMP adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk SMA ditambah satu mata pelajaran sesuai dengan jurusan atau peminatan siswa, sedangkan untuk SMK ditambah uji teori kejuruan sesuai dengan bidangnya.

Sementara itu, untuk USBN mata pelajaran yang diujikan adalah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Untuk SMP ditambah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, sedangkan untuk SMA terdapat juga mata pelajaran Sejarah dan tiga mata pelajaran sesuai program studi yang diambil siswa seperti Fisika, Kimia, Biologi untuk jurusan IPA; Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi untuk jurusan atau peminatan IPS; dan Bahasa dan Sastra Indonesia, Antropologi, Bahasa

Asing untuk jurusan atau peminatan Bahasa. Untuk siswa SMK terdapat uji keterampilan komputer. Dalam UN tahun 2017 siswa memilih satu mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran khas jurusan diujikan dalam USBN. Menurut menteri pendidikan, kalau anak memilih; materi akan lebih dalam, sehingga hasilnya menjadi luas dan mendalam. Kalau hanya tiga mata pelajaran, nanti siswa hanya luas saja, tidak menguasai secara dalam.

USBN dapat dilihat sebagai upaya perbaikan mutu evaluasi. Berbeda dengan UN yang menggunakan jenis soal pilihan ganda dan disiapkan oleh pemerintah pusat; soal USBN tidak hanya berbentuk pilihan ganda, tetapi juga berbentuk esai. Soal USBN akan disusun oleh pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP.

Meskipun demikian, pemerintah pusat akan menyiapkan beberapa pertanyaan jangka baik pilihan ganda maupun esai yang berfungsi

sebagai indikator standar nasional. Sesuai jadwal, UN diselenggarakan pada 3—6 April 2017 untuk jenjang SMK dan 10—13 April untuk jenjang SMA/MA. Pelaksanaan UN untuk SMP/Mts dijadwalkan dua gelombang, yakni gelombang pertama pada tanggal 2, 3, 4, dan 15 Mei 2017; dan gelombang kedua pada tanggal 8, 9, 10, dan 16 Mei 2017.

Sementara itu, untuk meminimalkan kecurangan dan hal-hal negatif lain, UN akan diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Untuk keperluan tersebut, Kabalitbag menyampaikan perlunya kerja sama khususnya resource sharing dalam penggunaan komputer. Saat ini telah terdata sebanyak 12.053 sekolah/madrasah dengan kapasitas total 2.188.947 siswa siap menjadi tempat pelaksanaan UNBK. Dengan jadwal UN SMK, SMA/MA, dan SMP/MTs yang berjalan tidak bersamaan, komputer dapat digunakan secara bergantian. Sekolah/Madrasah dengan jumlah komputer lebih dari 20 buah dan

# LAPORAN UTAMA

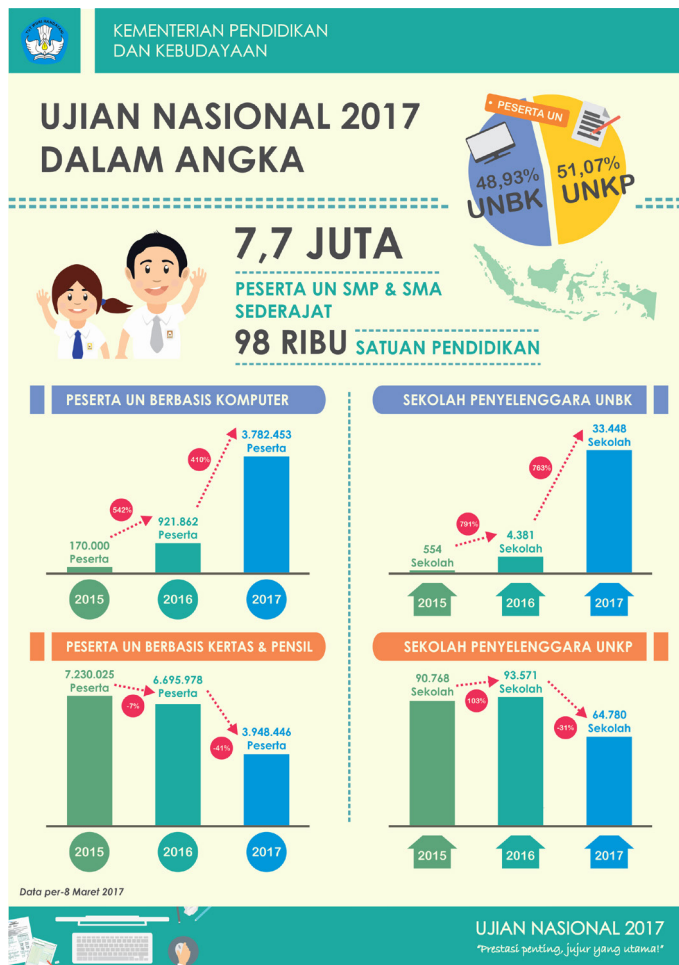
memiliki server dapat ditetapkan menjadi tempat pelaksanaan UNBK.

Ujian nasional, selalu menjadi bahan perbincangan menarik di jagat pendidikan negeri ini. Pro-kontra, menentang-mendukung pelaksanaan UN telah hadir sejak satu dekade lalu. Penghapusan UN bisa jadi

akan merupakan sebuah jalan keluar yang baik, tetapi bisa juga menjadi bumerang bila dilakukan secara tergesa-gesa. Penghapusan UN tidak berarti menghilangkan penilaian dalam pendidikan karena penilaian adalah bagian penting dalam pembelajaran. Untuk menyelenggarakan penilaian

yang tepat tanpa UN, perlu disiapkan guru dengan pelatihan penilaian secara komprehensif.

Dengan demikian, penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru benar-benar dapat objektif dan mengukur hasil belajar siswa dengan baik serta tidak ada lagi penilaian yang dikontrol oleh guru. Terkait dengan pelatihan tersebut, PPPPTK memainkan peranan penting. Pilihan lain yang dapat diambil adalah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kanada dengan menjalankan fungsi penjaminan pendidikan dengan baik sehingga kemajuan dan keberhasilan belajar siswa dapat tetap dikontrol. Perjalanan moratorium UN tampaknya masih harus melewati perjalanan panjang nan terjal yang akan bermuara pada sebuah pertanyaan: Mampukah UN mampu menjadi penyintas (*survivor*) dalam jagat pendidikan di Indonesia? 🇮🇩



<http://un.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/12/INFOGRAFIS-UN-2017.png>